

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada akhir tahun 2019, merebak berita mengenai kemunculan sebuah virus, di mana seseorang yang terpapar virus tersebut akan mengalami *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus bernama SARS-CoV-2 (*Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2*) dan pertama kali terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Dugaan awal penyebabnya berasal dari Pasar Huanan yang menjual *seafood* dan mamalia hidup. Namun, menurut Centers for Disease Control and Prevention (2022), tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa penularan koronavirus datang dari hewan. Justru dalam beberapa kasus, manusialah yang membuat hewan terinfeksi COVID-19. Oleh karena itu, perlu diingat bahwa kemungkinan besar manusia terpapar virus korona dikarenakan manusia lain, bukan hewan.

Kebanyakan orang yang terserang COVID-19 akan merasakan penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan dapat sembuh tanpa perawatan khusus. Meskipun demikian, beberapa orang bisa mengalami sakit parah sehingga membutuhkan bantuan medis. Orang yang sudah berumur dan memiliki riwayat penyakit semacam kardiovaskular, diabetes, pernapasan kronis, dan kanker lebih berpotensi menghadapi penyakit serius. Maka dari itu, cara yang tepat untuk mencegah dan menekan transmisi adalah dengan

memahami hal-hal tentang COVID-19 dan proses penyebaran virus. Perlindungan terhadap diri sendiri serta orang lain dapat dilakukan dengan menjaga jarak setidaknya satu meter, memakai masker, sering mencuci tangan atau menggunakan *hand sanitizer*, dan mendapatkan vaksinasi (World Health Organization, 2023).

Penularan virus yang cukup mudah membuat COVID-19 menyebar dengan cepat dan tak hanya mencakup Tiongkok saja, melainkan merambah ke negara-negara lain di dunia. Merujuk pada situs resmi National Center for Biotechnology Information (2022), persebaran kasus yang begitu cepat memaksa WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020. Sejak saat itu, virus korona telah menyebar ke 223 negara dengan laporan mengenai kasus terkonfirmasi mencapai lebih dari 593 juta dan angka kematian yang melebihi 6 juta.

Menghadapi pandemi yang berlangsung, tentunya pemerintah tiap negara telah mengeluarkan kebijakan guna mencegah dan menanganinya, termasuk Indonesia. Kebijakan sendiri didefinisikan sebagai keputusan atau tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan distribusi sumber daya alam, ekonomi, juga manusia untuk kepentingan umum. Pada dasarnya, kebijakan bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat (Suharto dalam Tuwu, 2020).

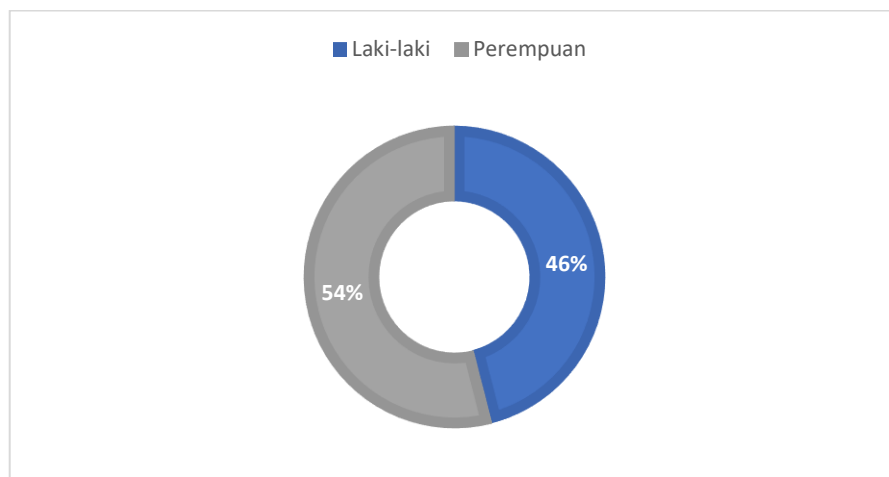
Di Indonesia, dalam rangka menekan angka positif kasus COVID-19, dirilislah Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pengadaan dan

Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19. Instruksi tersebut berisi pembatasan kegiatan pada sekolah, tempat kerja, dan tempat lainnya yang didatangi banyak orang dengan ketentuan tertentu pada provinsi atau daerah sesuai dengan zonasi pengendalian wilayah masing-masing. Selain itu, ada pula Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), di mana pelaksanaan vaksinasi bertujuan untuk meningkatkan imunitas seseorang terhadap COVID-19 dan pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota serta badan hukum/badan usaha dalam pelaksanaannya.

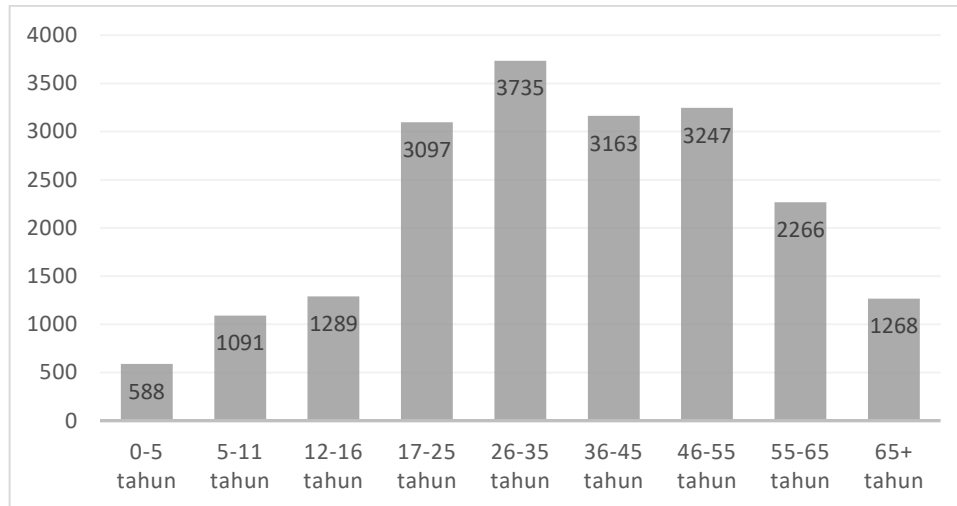
Sebagai negara yang menganut asas desentralisasi, kewenangan dalam mengurus persoalan pandemi ini tidak hanya dikerjakan oleh pemerintah pusat saja, akan tetapi juga melibatkan pemerintah daerah. Salah satu contohnya adalah dibentuknya Gugus Tugas COVID-19 pada provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Tidak berhenti sampai di situ, pemerintah provinsi pun bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota agar upaya penanganan COVID-19 semakin terlaksana secara maksimal, seperti Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang membagi tugas dengan pemerintah kabupaten/kota yang berada di Jawa Tengah, yang mana satu di antaranya ialah Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Kabupaten Wonosobo adalah salah satu kabupaten yang memiliki total kasus konfirmasi cukup banyak, bahkan termasuk ke dalam 20 besar kabupaten/kota dengan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 terbanyak di Jawa Tengah, yaitu lebih dari 18.000 kasus. Dari 18.000 kasus tersebut, lebih dari separuhnya berjenis kelamin perempuan. Sementara itu, ketika dilihat berdasarkan usia, angka tertinggi kasus COVID-19 berada pada usia 26-35 tahun yang mencapai 3.735 kasus (Corona.wonosobokab.go.id, 2023).

*Gambar 1. 1 Kasus Konfirmasi COVID-19 Kabupaten Wonosobo berdasarkan Jenis Kelamin s/d 15 Mei 2023*



*Gambar 1. 2 Kasus Konfirmasi COVID-19 Kabupaten Wonosobo berdasarkan Golongan Umur s/d 15 Mei 2023*



Sumber: corona.wonosobokab.go.id

Menurut Faniza, Wijaya, & Novandaya (2021), sebaran COVID-19 di Kabupaten Wonosobo dipengaruhi oleh pola ruang kewilayahan secara fisik dan sosial. Secara fisik, wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi memiliki efek yang lebih besar dari pada wilayah yang kepadatan penduduknya rendah. Tak hanya itu, rumah warga yang berdekatan serta tingginya aktivitas masyarakat juga menjadi salah satu alasan meningkatnya angka kasus terkonfirmasi di Wonosobo. Sementara itu, jika ditengok pada aspek sosial, masyarakat yang sering turut serta dalam kegiatan gotong-royong dapat meningkatkan sebaran COVID-19, meskipun di sisi lain kegiatan seperti demikian merupakan budaya yang terpuji.

Selama pandemi COVID-19, Pemerintah Kabupaten Wonosobo sudah menetapkan kebijakan-kebijakan terkait dengan pandemi yang berlangsung. Beberapa di antaranya adalah Surat Edaran Nomor: 360/040/2021 Tentang

Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Antisipasi Peningkatan Kasus COVID-19 di Kabupaten Wonosobo, Surat Edaran Nomor: 140/055/2020 Tentang Upaya Percepatan Siaga Intensif *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) oleh Pemerintah Desa, dan Surat Edaran Nomor: 360/087/2020 Tentang Ketentuan Tata Kelola Posko Jaga Siaga COVID-19 Tingkat Desa/Kelurahan di Kabupaten Wonosobo. Selain itu, ada pula Instruksi Bupati Wonosobo Nomor 090 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Penanganan COVID-19 di Tingkat Rukun Warga (RW) melalui Percepatan Pembentukan Satuan Tugas “Jogo Tonggo”.

Merujuk pada kebijakan penetapan pembatasan aktivitas masyarakat, Kabupaten Wonosobo tentu melakukan hal yang sama sebagai upaya pencegahan. Akibatnya, sekolah ditutup dan kegiatan belajar-mengajar dilaksanakan melalui daring. Sama halnya dengan pekerja kantor yang sesi kerjanya dibagi menjadi WFH dan WFO. Sementara itu, perekonomian petani menghadapi kemerosotan karena harga jual yang tidak sebanding dengan modal penanaman. Pelaku Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) pun terkena imbas sebab pembatasan aktivitas sehingga omset yang mereka dapatkan terjun bebas. Sektor lain yang terdampak di Kabupaten Wonosobo ialah pariwisata. Terkenal dengan keindahan alamnya, Wonosobo memiliki banyak destinasi wisata yang lantas terpaksa harus ditutup semenjak kasus COVID-19 melonjak tinggi. Penurunan wisatawan yang berkunjung membuat sektor ini menjadi lesu.

Adanya pandemi menghadirkan berbagai persepsi dari masyarakat terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan COVID-19. Imbas dari kekhawatiran yang dirasakan masyarakat memunculkan pandangan negatif kepada tenaga medis dan masyarakat yang terpapar virus korona, seperti mengucilkan penderita sampai menolak jenazah korban COVID-19. Masyarakat saat itu pun masih mudah termakan oleh berita-berita di luar sana yang belum tentu valid kebenarannya (Dai, 2020). Di Kabupaten Wonosobo, sebagian besar masyarakat sudah paham tentang COVID-19 dan ikut berpartisipasi dalam usaha pencegahan penyebaran kasus. Meskipun banyak warga yang sudah menaati kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, masih saja ada yang acuh tak acuh dengan merebaknya virus korona.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo dinilai cukup sigap atas langkah cepat yang dilakukan dalam melaksanakan penanganan COVID-19 di Wonosobo. Dengan meningkatnya tren kasus yang terjadi, salah satu langkah Pemerintah Kabupaten Wonosobo ialah bekerja sama dengan Forkopimda dan instansi kesehatan untuk menangani pandemi dengan cara mengonversi rumah sakit daerah menjadi rumah sakit khusus penanganan COVID-19 serta menggaet rumah sakit swasta untuk ikut berpartisipasi (jatengprov.go.id, 2021). Sementara itu, capaian vaksinasi di Kabupaten Wonosobo cukup rendah. Angka vaksinasi pada akhir tahun 2021 baru mencapai 66 persen dari 70 persen target yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga untuk mengejar target dilaksanakan vaksinasi serentak pada kabupaten dengan angka vaksinasi

yang masih rendah, salah satunya adalah Kabupaten Wonosobo (Sunandar, 2021)

Kebijakan pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19, seperti pembatasan masyarakat dalam beraktivitas dan pengadaan vaksinasi, telah menimbulkan berbagai respons dan persepsi dari masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, menarik untuk mengetahui lebih jauh lagi terkait persepsi mahasiswa, yang merupakan bagian dari masyarakat, terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19, terutama di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020-2021.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimanakah persepsi mahasiswa Wonosobo terhadap kebijakan PPKM dan vaksinasi dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 tahun 2020-2021 oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa Wonosobo terhadap kebijakan PPKM dan vaksinasi dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 tahun 2020-2021 oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo.



## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi, menambah pengetahuan, dan menjadi bahan kajian yang terkait dengan kebijakan pemerintah pada masa pandemi COVID-19.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan maupun evaluasi bagi pemerintah secara umum dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam menetapkan kebijakan.

#### **b. Bagi Masyarakat dan Mahasiswa**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi masyarakat serta mahasiswa mengenai kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 sekaligus mengetahui persepsi mahasiswa terhadap kebijakan yang ditetapkan.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Dalam melaksanakan penelitian, diperlukan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan acuan. Pada penelitian ini, beberapa penelitian terdahulu yang signifikan adalah sebagai berikut.

Tabel 1. 1 Tinjauan Pustaka

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Iqbal Yudha Anggoro dan Rahmawati Husein (2022)	Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Penanganan <i>Coronavirus Disease (COVID-19)</i> (Studi Kasus: Kemantren Umbulharjo Tahun 2020-2021)	Kuantitatif	Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyebarkan informasi belum efektif sebab masih ada masyarakat yang meragukan keberadaan virus korona. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi guna meningkatkan pemahaman masyarakat terkait COVID-19.
2.	Minawati Lingga, Helmi, dan Saddam Rasanjani (2021)	Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Provinsi Aceh	<i>Mix-method</i>	Berbagai kebijakan pemerintah dari tingkat desa hingga provinsi yang telah dikeluarkan di Aceh, dianggap baik oleh masyarakat. Namun, untuk implementasinya masih kurang. Persepsi masyarakat pada penanggulangan COVID-19 pun sudah dinilai baik dalam hal pemberian fasilitas dan bantuan.
3.	Wahyuni Fitri, Wais Alqarni, dan Helmi (2022)	Persepsi Masyarakat Kota Banda Aceh terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi COVID-19 Melalui Vaksinasi	<i>Mix-method</i>	Pemerintah Kota Banda Aceh sudah mengadakan sosialisasi perihal vaksinasi dan memberikan sembako serta hadiah kepada masyarakat yang setuju datang dan mendapatkan vaksinasi, tetapi partisipasi masyarakat masih rendah.
4.	Wahyudiyono, Bambang Riawan Eko,	Persepsi Masyarakat terhadap COVID-	Kuantitatif	Hasil penelitian ini adalah mayoritas responden khawatir

	dan Trisnani (2021)	19 Pasca PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat)		akan COVID-19 dan varian baru yang muncul. 90,7% responden percaya bahwa vaksinasi dapat mengurangi penularan virus. Mayoritas responden juga sudah divaksinasi kedua dan jika vaksinasi ketiga diadakan, sebanyak 83,2% responden bersedia mengikuti vaksinasi tersebut.
5.	Made Dwi Adnjani dan Trimah (2021)	Tingkat Pengetahuan dan Persepsi Masyarakat Jawa Tengah tentang Virus Corona di Masa Pandemi COVID-19	Survei analitik	Sebagian besar masyarakat Jawa Tengah mendapatkan informasi mengenai COVID-19 dari <i>google</i> , media sosial, dan TV. Sebagian masyarakat Jawa Tengah berpendapat bahwa COVID-19 merupakan wabah menakutkan yang lantas menimbulkan persepsi buruk, sementara sebagian lain memiliki persepsi baik karena dengan munculnya COVID-19, hubungan keluarga terjalin dengan baik.
6.	Ika Purnamasari dan Anisa Ell Raharyani (2020)	Tingkat Pengetahuan dan Perilaku Masyarakat Kabupaten Wonosobo tentang COVID-19	Kuantitatif	Penelitian ini menjelaskan jika masyarakat Kabupaten Wonosobo memiliki pengetahuan yang tinggi mengenai COVID-19. Sementara itu, untuk perilaku masyarakat Kabupaten Wonosobo, mayoritas sudah berperilaku baik dengan menaati protokol kesehatan.

7.	Dian Kus Pratiwi (2021)	Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan COVID-19	Yuridis normatif	Hasil penelitian ini adalah inovasi kebijakan pemerintah daerah dibutuhkan dalam hal penanganan COVID-19 dengan beberapa alasan, antara lain adanya hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, adanya permasalahan dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah menyebabkan penanganan pandemi tidak efektif, kebijakan pemerintah belum efektif, dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab langsung pada rakyat terutama dalam aspek kesehatan.
8.	Joko Pramono dan Farco Siswiyanto Raharjo (2020)	Kebijakan Taktis Pemerintah Daerah di Pulau Jawa dalam Penanganan <i>Coronavirus Disease</i> (COVID-19)	<i>Content analysis</i>	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam penanganan pandemi COVID-19, setiap kepala daerah memiliki cara mereka masing-masing. Mayoritas kepala daerah di Pulau Jawa mengambil tindakan lebih dulu dalam upaya menangani COVID-19 karena pemerintah pusat dianggap lambat memberikan instruksi.
9.	Adi Heru Susanto dan Budi S. Kramadibrata (2020)	Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Kebijakan Pemerintah terhadap Pengurangan Penyebaran Virus	Kuantitatif	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kesinergisan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menerapkan kebijakan yang didukung oleh partisipasi masyarakat

		COVID-19		sangat berperan dalam penekanan persebaran COVID-19.
10.	Saiful Munjani dan Deni Irvani (2020)	Sikap dan Perilaku Warga terhadap Kebijakan Penanganan Wabah COVID-19	Survei	Berdasarkan penelitian ini, warga yang tidak menaati peraturan PSBB lebih banyak berasal dari kelompok dengan pendapatan dan tingkat pendidikan yang rendah. Penelitian ini pun mengidentifikasi kalau warga yang tak mengindahkan protokol kesehatan dikarenakan mereka harus bekerja.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun persamaan dengan penelitian ini ialah pembahasan terkait dengan kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Sedangkan perbedaannya adalah subjek penelitian dalam penelitian ini lebih fokus pada persepsi mahasiswa karena mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat serta generasi muda yang berpotensi menjadi penerus bangsa serta memiliki pemikiran kritis terhadap persoalan yang terjadi di Indonesia, dalam hal ini pandemi COVID-19. Selain itu, mahasiswa sebagai subjek penelitian belum ada pada penelitian terdahulu.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Persepsi**

#### **a. Pengertian Persepsi**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi diartikan sebagai tanggapan langsung dari sesuatu. Arti lainnya ialah proses di mana seorang individu memahami beragam hal melalui alat indranya. Kemudian, persepsi menurut Laura A. King adalah sebuah proses penyusunan dan penafsiran data atau informasi sensorik sehingga data atau informasi tersebut memiliki arti (King, 2011). Sedangkan Robert S. Feldman mengemukakan bahwa persepsi merupakan kegiatan dalam memilah, menginterpretasi, menganalisis, dan memadukan rangsangan oleh otak dan alat indra (Feldman, 2007). Sementara itu, Bimo Walgito mendefinisikan persepsi sebagai suatu proses pengindraan, di mana individu menerima stimulus melalui alat indra dan stimulus tersebut kemudian dilanjutkan menjadi proses persepsi. Davidoff dan Rogers menyatakan, karena persepsi adalah suatu aktivitas yang telah terintegrasi dalam diri seseorang, maka apa yang ada di dalam diri tersebut ikut aktif dalam persepsi. Oleh karena itu, persepsi bisa diungkapkan sebab perasaan, kemampuan berpikir, dan pengalaman manusia yang tidak sama, sehingga hasil persepsi akan berbeda pada masing-masing individu (Walgito, 2010).

Dengan pendapat dari beberapa ahli di atas, maka bisa disimpulkan bahwa persepsi merupakan sebuah proses pada tiap individu dalam menanggapi sesuatu, di mana alat indra menerima stimulus dan selanjutnya stimulus itu akan diinterpretasikan, sehingga individu akhirnya dapat memahami suatu hal tersebut.

#### **b. Aspek-Aspek dalam Persepsi**

Menurut Bimo Walgito (dalam kutipan Anggoro, 2021), terdapat tiga aspek penting dalam persepsi, yaitu:

1. Aspek Kognitif merupakan aspek yang berhubungan dengan wawasan, cara berpikir individu untuk memperoleh pengetahuan, dan hasil dari pemikiran individu atas suatu hal.
2. Aspek Afektif, yakni aspek yang berkaitan dengan perasaan dan emosi individu akan suatu hal atau peristiwa yang dilatarbelakangi oleh nilai-nilai dan moral yang dimiliki.
3. Aspek Konatif, adalah aspek yang berkorelasi dengan motivasi atas perbuatan serta kegiatan seseorang yang sesuai dengan persepsi dirinya pada hal atau keadaan khusus.

### **c. Faktor-Faktor yang Berperan dalam Persepsi**

Walgito (2010) memaparkan bahwa stimulus merupakan hal yang penting dalam proses persepsi. Berkaitan dengan itu, ada beberapa faktor yang berfungsi pada persepsi, antara lain:

#### **1. Objek yang dipersepsi**

Dalam memersepsi sesuatu, objek adalah salah satu yang memiliki peran penting, di mana objek ini memunculkan stimulus yang kemudian akan menyinggung reseptor. Stimulus dapat hadir dari dalam dan luar diri individu, tetapi mayoritas stimulus berasal dari luar individu.

#### **2. Alat indra, syaraf, dan pusat susunan syaraf**

Pada proses persepsi, ketika seseorang mendapatkan stimulus, alat indralah yang menerimanya. Kemudian, syaraf sensoris bertugas menyalurkan stimulus ke pusat susunan syaraf, yakni otak sebagai pusat kesadaran. Sementara itu, syaraf motoris menjadi alat untuk membangun respons.

#### **3. Perhatian**

Perhatian sebagai konsentrasi dari keseluruhan aktivitas seseorang yang dipusatkan pada sekelompok objek berperan penting dalam persepsi, karena perhatian menjadi langkah pertama untuk membentuk persepsi.



#### **d. Proses Persepsi**

Proses terbentuknya persepsi diterangkan sebagai berikut. Suatu objek mendatangkan stimulus, lantas stimulus diterima alat indra untuk diteruskan ke otak oleh syaraf sensoris. Di otak, proses yang terlaksana membuat individu sadar akan apa yang dilihat, didengar, ataupun diraba sebab otak merupakan pusat kesadaran. Maka dari itu, bisa dikatakan bahwa proses terakhir dari persepsi adalah individu mengetahui apa yang mereka lihat, dengar, maupun raba. Proses terakhir tersebut merupakan persepsi yang sebenarnya dan respons yang diambil oleh masing-masing individu sebagai dampak dari persepsi bisa beraneka ragam (Walgito, 2010).

Warsah & Daher (2021) menguraikan tiga komponen penting pada proses persepsi, yaitu:

1. Seleksi ialah proses yang dilakukan oleh alat indra untuk menyaring rangsangan yang datang dari luar, jenis, serta intensitas.
2. Interpretasi adalah pengorganisasian informasi yang diterima sehingga memiliki arti. Interpretasi bergantung pada kemampuan individu untuk mengategorikan informasi, di mana terjadi reduksi sehingga informasi yang kompleks dapat disederhanakan.

3. Interpretasi dan persepsi lantas diartikan menjadi tingkah laku sebagai sebuah reaksi.

**e. Organisasi Persepsi**

Dalam bukunya, Walgito (2010) memaparkan bahwa ketika individu membangun persepsi, timbullah suatu masalah mana yang hendak dipersepsi lebih dulu, apakah bagian dulu yang dipersepsi baru keseluruhannya atau malah sebaliknya. Hal tersebut berhubungan dengan bagaimana individu melakukan pengorganisasian terhadap persepsi yang dimilikinya. Dari situ, muncul dua teori yang berlawanan, yakni teori elemen dan teori Gestalt. Pada teori elemen, seseorang akan memersepsikan sesuatu mulai dari bagian-bagiannya terlebih dahulu, baru setelah itu keseluruhannya. Dalam teori ini, dapat dikatakan bahwa bagian-bagian itu sebagai hal primer, sedangkan keseluruhan sebagai hal sekunder. Berbanding terbalik dengan teori Gestalt, di mana individu akan membangun persepsi dari keseluruhannya, setelah itu baru ke bagian-bagiannya. Hingga saat ini, kedua teori tersebut masih dipakai, akan tetapi teori Gestalt lebih berkembang.

**f. Objek Persepsi**

Dalam persepsi, ada banyak hal yang dapat dijadikan sebagai objek. Saking banyaknya objek yang bisa dipersepsi, akhirnya objek persepsi digolongkan menjadi dua, yakni objek manusia dan non-

manusia. Objek yang berwujud manusia biasa disebut sebagai *person perception* atau *social perception*. Sementara objek nonmanusia disebut dengan *nonsocial perception* atau *things perception* (Walgito, 2010).

## **2. Kebijakan Publik**

### **a. Pengertian Kebijakan Publik**

Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye, sebagaimana kutipan dalam Anggara (2014), merupakan sebuah pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sebagai tindakan pemerintah, baik melakukan atau pun tidak melakukan sesuatu tetap ada tujuannya. Kebijakan harus dilakukan dan menjadi manfaat bagi masyarakat perlu menjadi suatu pertimbangan yang holistik, sehingga kebijakan itu memiliki manfaat dan tidak merugikan masyarakat. Sementara itu, David Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu alokasi nilai-nilai yang sah untuk seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, Chief J. O. Udoji dalam Abdoellah & Rusfiana (2016) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan dengan tujuan tertentu dan membidik ke permasalahan yang memiliki keterkaitan dan berpengaruh pada masyarakat.

Dari beberapa pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik ialah sebuah tindakan pemerintah yang diwujudkan dalam peraturan atau pun keputusan atas masalah yang

memengaruhi masyarakat. Kebijakan publik dibentuk agar bermanfaat dan dapat menyejahterakan seluruh masyarakat.

#### **b. Perkembangan Studi Kebijakan Publik**

John Dewey merupakan orang pertama yang mengemukakan ide agar kebijakan publik dapat digali secara sistematis. Dalam bukunya yang berjudul “*Logic: The Theory of Inquiry Dewey*”, John Dewey menaruh perhatian pada eksperimen yang berhubungan dengan kebijakan publik, seperti cara mengukur kebijakan dan gambaran bagaimana rencana tindakan dipilih dari berbagai alternatif. Ide John Dewey ini lantas dikembangkan oleh Harold D. Lasswell dengan menajamkan ide ilmu kebijakan menjadi sebuah disiplin yang tak terpecah dari disiplin ilmu lainnya. Pada perkembangan berikutnya, dengan banyaknya permasalahan kebijakan publik menumbuhkan banyak spesialis analisis kebijakan publik dari pemerintah dan swasta. Langkah selanjutnya, para peneliti berupaya merampatkan serta membangun teori mengenai proses pengambilan kebijakan pemerintah dengan menerapkan metode dari bidang studi lain (Abdoellah & Rusfiana, 2016).

#### **c. Dimensi Kebijakan Publik**

Bridgeman dan Davis, seperti dikutip oleh Anggara (2014), menjelaskan bahwa kebijakan publik mempunyai tiga dimensi yang berkaitan satu sama lain, yaitu:

1. Kebijakan publik sebagai tujuan (*objective*) merupakan tindakan pemerintah yang diciptakan guna meraih hasil tertentu yang menjadi harapan publik sebagai bagian penting dari pemerintahan.
2. Kebijakan publik sebagai tindakan yang legal dan sah dalam hukum (*authoritative choice*), sebab kebijakan publik dibentuk oleh lembaga negara yang memiliki kemampuan melegitimasi pada sistem pemerintahan.
3. Kebijakan publik sebagai hipotesis (*hypothesis*) adalah kebijakan publik yang dibangun sesuai dengan teori, hipotesis, atau pun model tentang sebab-akibat, di mana kebijakan terus bertumpu pada asumsi akan tingkah laku.

**d. Elemen dalam Kebijakan Publik**

Menurut Dunn dalam Anggara (2014), dalam proses kebijakan publik terdapat tiga elemen penting, antara lain:

1. Lingkungan kebijakan (*policy environments*) merupakan sesuatu yang menjadi motif kerangka sebuah peristiwa yang kemudian memunculkan isu kebijakan, yang memengaruhi serta dipengaruhi oleh pelaku kebijakan dan kebijakan itu sendiri.

2. Kebijakan publik (*public policies*) adalah keputusan atas deretan pilihan yang saling berkaitan (termasuk keputusan untuk tak melakukan) dan dibuat oleh badan pemerintah dengan tujuan tertentu.
3. Pelaku kebijakan (*policy stakeholders*) yakni kelompok maupun perseorangan yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh keputusan dari pemerintah.

**e. Aspek yang Berkaitan dengan Kebijakan Publik**

Terdapat tiga aspek yang harus diperhatikan yang berhubungan dengan kebijakan publik menurut Burdock (sesuai kutipan Anggara, 2014), di antaranya:

1. Aspek kesejarahan, di mana terjadi perubahan kebijakan di masa sekarang dalam kondisi yang sama dan pernah dibuat di masa lampau.
2. Aspek lingkungan, yakni pengaruh lingkungan yang amat kuat terhadap kebijakan publik, lebih tepatnya kala kebijakan dibentuk dan dilaksanakan.
3. Aspek kelembagaan, sebab pembuatan kebijakan publik tidak pernah lepas dari yang namanya lembaga.

## **G. Definisi Konseptual**

### **1. Persepsi**

Persepsi adalah sebuah proses pada tiap individu dalam menanggapi sesuatu yang melibatkan pancaindra, sehingga individu pada akhirnya dapat memahami sesuatu hal tersebut. Menurut Bimo Walgito, tiga aspek penting pada persepsi adalah aspek kognitif, afektif, dan konatif.

### **2. Kebijakan Publik**

Kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah yang diwujudkan dalam peraturan atau keputusan atas masalah yang memengaruhi masyarakat dan dibentuk supaya menyejahterakan masyarakat. Menurut Dunn, ada tiga elemen penting dalam kebijakan publik, antara lain lingkungan kebijakan, kebijakan publik, dan pelaku kebijakan.

## **H. Definisi Operasional**

Salah satu unsur yang berfungsi membantu dalam penelitian adalah definisi operasional. Definisi operasional adalah gambaran teliti tentang langkah-langkah yang dibutuhkan guna mengumpulkan unit analisis ke dalam kategori dari variabel yang ada (Priyono, 2008). Pada penelitian ini, definisi operasionalnya adalah sebagai berikut.

Tabel 1. 2 Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Parameter
Persepsi Mahasiswa	Aspek Kognitif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui Surat Edaran dan Instruksi Pemerintah Kabupaten Wonosobo tentang penanganan COVID-19</li> <li>2. Mengetahui penyebab dan dampak dari COVID-19</li> <li>3. Mengetahui tentang pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi</li> <li>4. Mendapatkan informasi tentang COVID-19 dan vaksinasi melalui <i>website</i> resmi pemerintah</li> <li>5. Memahami protokol kesehatan yang diterapkan</li> </ol>
	Aspek Afektif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecemasan mengenai persebaran dan penularan COVID-19</li> <li>2. Memercayai berita <i>hoax</i> terkait COVID-19 dan vaksinasi yang tersebar</li> <li>3. Merasa jenuh dan stres selama pandemi berlangsung</li> </ol>
	Aspek Konatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mematuhi kebijakan atau peraturan yang ditetapkan</li> <li>2. Menerapkan <i>physical distancing</i> ketika berkegiatan di luar rumah</li> <li>3. Menjaga kebersihan sebagai upaya pencegahan COVID-19</li> <li>4. Memakai masker tiap beraktivitas di luar rumah</li> <li>5. Mencuci tangan dan membawa <i>hand sanitizer</i> ketika beraktivitas di luar rumah</li> <li>6. Melaksanakan vaksinasi guna mencegah penyebaran COVID-19</li> <li>7. Menghimbau keluarga/kerabat dan teman untuk berpartisipasi dalam pencegahan COVID-19</li> <li>8. Mengajak keluarga/kerabat dan teman untuk melaksanakan vaksinasi</li> <li>9. Meluruskan berita <i>hoax</i> mengenai COVID-19 dan vaksinasi kepada keluarga/kerabat dan teman</li> </ol>



## **I. Metode Penelitian**

Penelitian menurut David H. Penny adalah pemikiran yang terstruktur tentang bermacam masalah dan cara penyelesaiannya dengan mengumpulkan serta mengelaborasi fakta. Sedangkan menurut Sutrisno Hadi, penelitian sesuai dengan tujuannya, diterangkan sebagai sebuah usaha untuk mendapatkan, menguraikan, dan menguji kebenaran dalam pengetahuan (sesuai kutipan Priyono, 2008). Sementara itu, metode penelitian pada dasarnya adalah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan informasi dengan sebuah maksud dan manfaat tertentu (Sugiyono, 2013).

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif sendiri, menurut Sugiyono (2013), merupakan metode penelitian yang berdasarkan atas filsafat positivisme dan dipakai untuk meneliti pada populasi dan sampel khusus, data dikumpulkan melalui instrumen penelitian, analisis data dilakukan secara statistik, serta memiliki tujuan untuk mengukur hipotesis yang ditentukan. Menurut Hadjar (dalam kutipan Siyoto & Sodik, 2015), penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bebas nilai atau dalam arti lain merupakan sebuah penelitian yang amat ketat mengaplikasikan prinsip objektivitas.

## **2. Lokasi Penelitian**

Pada penelitian persepsi mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19, lokasi penelitiannya adalah Kabupaten Wonosobo. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Wonosobo merupakan kabupaten yang termasuk ke dalam 20 besar kabupaten/kota dengan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 terbanyak di Jawa Tengah, yakni dengan jumlah lebih dari 18.000 kasus. Selain itu, belum ada penelitian terdahulu yang mengambil lokasi di Kabupaten Wonosobo.

## **3. Unit Analisis Data**

Unit analisis data pada penelitian ini adalah mahasiswa di Kabupaten Wonosobo yang mengetahui tentang kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam melakukan penanganan COVID-19 pada tahun 2020-2021.

## **4. Populasi dan Sampel**

### **a. Populasi**

Populasi merupakan keseluruhan dari subjek penelitian yang bisa berwujud benda, orang, dan segala sesuatu yang dapat menghasilkan data penelitian (Ismiyanto dalam Siyoto & Sodik, 2015). Dalam penelitian ini, populasinya adalah mahasiswa yang berdomisili asal di Kabupaten Wonosobo.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, jumlah penduduk di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2021 ialah

sebanyak 886.613 jiwa (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2022). Kemudian, persentase penduduk berusia 5 tahun ke atas yang masih bersekolah dengan status pendidikan Diploma I sampai dengan Universitas di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2021 sebanyak 1,13% (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2022). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo (2022) pada publikasi Kabupaten Wonosobo dalam Angka 2022, penduduk berumur 0-4 tahun pada tahun 2021 berjumlah 67.609 jiwa. Total penduduk di Kabupaten Wonosobo setelah dikurangi penduduk berusia 0-4 tahun adalah 819.004 jiwa.

Dari data-data di atas, penduduk yang masih menyangang status pelajar tingkat Diploma I sampai dengan Universitas di Kabupaten Wonosobo dapat dihitung dengan cara seperti berikut.

$$n = A\% \times B$$

$$n = 1,13\% \times 819.004$$

$$n = 9.254 \text{ jiwa}$$

Keterangan:

$n$  = jumlah penduduk berstatus pendidikan Diploma I sampai dengan Universitas di Kabupaten Wonosobo

$A\%$  = persentase penduduk berusia 5 tahun ke atas yang masih bersekolah dengan status pendidikan Diploma I sampai dengan Universitas di Kabupaten Wonosobo

$B$  = jumlah penduduk di Kabupaten Wonosobo setelah dikurangi jumlah penduduk berumur 0-4 tahun

Dari perhitungan tersebut, maka populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa di Kabupaten Wonosobo yang totalnya 9.254 orang.

#### **b. Sampel**

Menurut Sugiyono (2013), sampel adalah bagian dari total dan karakteristik populasi yang sudah ditentukan. Kesimpulan dari apa yang diteliti dari sampel bisa digunakan untuk populasi, sehingga sampel yang diambil harus betul-betul mewakili populasi.

Sampel pada penelitian ini adalah mahasiswa di Kabupaten Wonosobo dan didapatkan dengan menggunakan rumus Solvin (*margin error* 10% = 0,01), yakni sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{9.254}{1 + 9.254 (0,01)^2}$$

$$n = \frac{9.254}{93,54}$$

$$n = 98,93 = 99 \text{ sampel}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = *margin error*

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka jumlah sampel pada penelitian ini adalah mahasiswa di Wonosobo sebanyak 99 orang.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data di mana serangkaian pertanyaan dibuat dan diberikan kepada responden untuk dijawab. Kuesioner dapat berbentuk pertanyaan terbuka maupun tertutup dan dapat diberikan kepada responden secara langsung, dikirim melalui pos, atau pun lewat internet (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini, kuesioner akan diberikan kepada responden, yakni mahasiswa di Kabupaten Wonosobo. Untuk memvalidasinya,

responden akan diminta untuk mengisi asal kecamatan tempat tinggalnya. Kuesioner akan disebar ke mahasiswa yang berkuliah di wilayah Wonosobo, Yogyakarta, Semarang, Temanggung, Purwokerto, Solo, dan lainnya. Selain itu, kuesioner juga akan disebar ke grup yang beranggotakan mahasiswa dari Wonosobo, seperti grup Keluarga Mahasiswa Wonosobo.

#### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan pengumpulan informasi atau data dari surat kabar, buku, transkrip, majalah atau sumber lainnya yang berkaitan dengan rumusan masalah, yang mana dalam penelitian ini ialah kebijakan pemerintah dalam menangani COVID-19 di Wonosobo.

### **6. Jenis Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya dan mempunyai sifat yang aktual. Data primer dapat dikumpulkan melalui berbagai cara, seperti observasi, wawancara, FGD, serta menyebarkan kuesioner (Siyoto & Sodik, 2015). Pada penelitian ini, data primer didapatkan dengan cara mengumpulkan jawaban responden dari kuesioner yang telah diberikan.

## **b. Data Sekunder**

Menurut Siyoto & Sodik (2015), data sekunder merupakan data yang dikumpulkan melalui sumber yang sudah ada sebelumnya, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), majalah, buku, koran, dan lain-lain.

## **7. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah serentetan kegiatan menelaah, mengklasifikasi, menafsirkan, serta memverifikasi data atau informasi supaya sebuah fenomena bisa mendapatkan nilai sosial, pengetahuan, dan ilmiah (Siyoto & Sodik, 2015). Analisis data dilakukan setelah data telah terkumpul dari seluruh sumber data. Kegiatan pada analisis data ini meliputi, menyatukan data sesuai dengan variabel dan jenis responden, membuat tabel berisi data berdasarkan variabel dari responden, serta melaksanakan perhitungan guna menjawab rumusan permasalahan yang ada (Sugiyono, 2013). Pada penelitian ini, data didapatkan dari kuesioner yang disebar kepada responden dengan jenis kuesioner lima tingkat (*likert*). Skor penilaian untuk skala *likert* adalah sebagai berikut.

- |   |   |
|---|---|
| a) Sangat Setuju/Selalu diberi skor             | 5 |
| b) Setuju/Sering diberi skor                    | 4 |
| c) Ragu-ragu/Kadang-kadang diberi skor          | 3 |
| d) Tidak setuju/Hampir tidak pernah diberi skor | 2 |
| e) Sangat tidak setuju/Tidak pernah diberi skor | 1 |

Sementara itu, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah statistik deskriptif, di mana pengolahan datanya menggunakan perangkat lunak SPSS. Sugiyono (2013) mengartikan statistik deskriptif sebagai statistik yang dipakai untuk melakukan analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menjelaskan data yang telah terkumpul tanpa membuat kesimpulan secara umum. Kemudian, untuk dapat mengetahui kesimpulan dari data yang didapat, maka digunakan rentang kriteria penelitian rata-rata.

*Tabel 1. 3 Kriteria Penelitian Rata-rata*

<b>Rentang Skala</b>	<b>Kriteria</b>
1,00 - 1,80	Sangat Tidak Baik
1,81 - 2,60	Tidak Baik
2,61 - 3,40	Cukup Baik
3,41 - 4,20	Baik
4,21 - 5,00	Sangat Baik

Kriteria penelitian tersebut didapatkan melalui rumus berikut.

$$\text{Panjang kelas interval} = \frac{\text{Rentang}}{\text{Banyak kelas interval}}$$

Dimana:

$$\text{Rentang} = \text{nilai tertinggi} - \text{nilai terendah} = 5 - 1$$

$$\text{Banyak kelas interval} = 5$$

$$\text{Sehingga, panjang kelas interval} = \frac{5-1}{5} = 0,8$$